

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wadah demokrasi yang menjadi ajang kedaulatan bagi rakyat. Sebuah negara dikatakan demokrasi dapat tercermin dari proses pemilu yang berjalan dengan lancar sehingga, masyarakat mendapatkan haknya secara adil. Negara yang demokratis menjadikan pemilu sebagai gambaran terhadap suara rakyat di mana hal ini menjadi tujuan kedepan mengenai bagaimana arah dari adanya sebuah bangsa (Alfiyani, 2018). Keikutsertaan rakyat pada pemilu merupakan sebuah wujud dari adanya tanggungjawab sebagai warga negara dan bentuk partisipasi dalam berpolitik. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suara rakyat direalisasikan dalam bentuk pilihan, yaitu hak yang dimiliki untuk memilih dari calon yang ada (Astuti et al., 2021). Menurut (Budiardjo, 2007) pemilu atau sistem pemilu dianggap sebagai sebuah lambang dan juga tolak ukur dari sebuah demokrasi. Penentuan sebuah negara dikatakan demokrasi dapat dilihat dari bagaimana proses terhadap perputaran kekuasaan melalui tahapan pemilu (Khoiron & Siboy, 2018).

Pemilu diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suara rakyat direalisasikan dalam bentuk pilihan, yaitu hak yang dimiliki untuk memilih dari calon yang ada (Astuti et al., 2021). Menurut (Budiardjo, 2007) pemilu atau sistem pemilu dianggap sebagai sebuah lambang dan juga tolak ukur dari sebuah demokrasi. Penentuan sebuah negara dikatakan

demokrasi dapat dilihat dari bagaimana proses terhadap perputaran kekuasaan melalui tahapan pemilu (Khoiron & Siboy, 2018). Pada Februari Tahun 2024 setelah pelaksanaan pemilihan presiden, pada tahun yang sama akan dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara serentak se Indonesia pada bulan November. Negara yang menganut sistem demokrasi salah satu ciri-cirinya yaitu adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, dalam memilih pejabat publik baik pada tingkat lokal seperti kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sudah dianggap menjadi sebuah tolak ukur demokrasi hal ini dikarenakan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dan bisa menentukan sikap terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya (Saputra, 2014a).

Pelaksanaan pilkada 2024 merujuk pada peraturan sebelumnya yaitu undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 Tahun 2015 tentang penetapan aturan pemerintah pengganti UU no 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian, pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut pilkada memberikan gambaran terhadap kualitas demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dengan ini pilkada secara nyata telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memilih calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili oleh DPRD (Rusdi, 2022).

Nelson dalam (Budiardjo, 2007) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh segenap warga negara sebagai bagian dari individu guna dapat mempengaruhi sebuah proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang bersifat kelompok ataupun perseorangan. Pemilihan kepala daerah

merupakan sebuah langkah besar yang mengarah kedepan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Adanya pilkada merupakan wujud dari reaslisasi demokratisasi pada tingkat daerah (G. D. Maharani, 2017).

Pilkada yang dilakukan secara langsung sedemikian rupa merupakan sebuah proses politik yang bukan hanya tentang mekanisme politik untuk mengisi jabatan tetapi, ini termasuk penerapan dalam pelaksanaan otonomi daerah atau disebut juga desentralisasi politik yang sebenarnya. Dilansir dari (CCNIndonesia, 2024) KPU akan melakukan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Aturan mengenai pilkada serentak tertuang pada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan serta jadwal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November mendatang di ikuti oleh 37 provinsi yang terdiri dari 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Lebih lanjut untuk Provinsi Kepulauan Riau yakni di daerah-daerah Kabupaten/Kota juga menyambut gembira pilkada serentak yang akan dilaksanakan November mendatang termasuk di Kota Tanjungpinang. Pilkada Kota Tanjungpinang hanya diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dua pasangan calon tersebut ialah Lis Darmansyah dan Raja Ariza yang didukung oleh partai (Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, PPP, Perindo, Gelora, Ummat, dan Garuda) yang mana terdiri dari 6 partai parlemen dan 4 partai non parlemen dengan dukungan dari partai parlemen Lis-Raja mengantongi 20 kursi atau sekitar 66% dari total 30 kursi di DPRD Kota Tanjungpinang.

Pasangan calon selanjutnya ialah Rahma dan Rizha Hafiz yang didukung oleh partai (NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PSI, Partai Buruh, PBB) di mana 4 partai tersebut masuk dalam parlemen, dukungan yang diperoleh Rahma-Rizha sebanyak 10 kursi atau sekitar 33% dari total 30 kursi di DPRD Kota Tanjungpinang dikutip dari (Gunawan, 2024).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 1, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut menjadikan partai politik sebagai gerbang bagi pasangan calon yang ingin maju memperebutkan jabatan kepala daerah. Menurut (Huwae, 2024) tidak ada lagi alasan bagi putra putri daerah maupun kader partai untuk tidak menggunakan partai sebagai persyaratan yang penting untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dukungan dari partai baik partai pengusung maupun partai pendukung memiliki peranan yang penting terhadap calonitu sendiri, semakin banyak dukungan yang diperoleh dari partai maka semakin banyak pula dukungan yang didapat begitupun sebaliknya.

Hal yang menarik pada pilkada Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang saat ini adalah dari masing-masing pasangan calon yang mana calon wali kota dan wakil walikota saat ini dulunya pernah menduduki kursi wali kota Tanjungpinang. Dimulai dari calon dengan nomor urut 1 Rahma-Rizha Hafizd dengan slogannya Tanjungpinang lebih maju, secara singkat pengalaman politik dari calon walikota Rahma yaitu sebelum menjadi walikota Rahma merupakan wakil walikota bersama dengan Syahrul sebagai wali kota dengan masa jabatan 2018-2020, kemudian saat

walikota Syahrul meninggal dunia Rahma diangkat sebagai walikota dengan wakilnya Endang Abdullah dengan masa jabatan 3 Tahun dari 2020-2023. Selain itu Rahmah juga memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang pada periode 2014-2018. Hal tersebut membuat Rahma untuk kembali mencalonkan diri sebagai walikota yang berpasangan dengan Rizha Hafidz di mana pengalaman Rizha bukan dari ranah politik melainkan sebagai seorang ustadz milenial dan biker. Dorongan terhadap Rizha untuk terjun ke ranah politik semakin kuat ketika ada sejumlah tokoh agama serta masyarakat yang memintanya untuk maju sebagai wakil walikota Tanjungpinang pada pilkada Tahun 2024 (lintaskepricom, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut pasangan calon Rahma dan Ridza Hafiz mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Adapun kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ini salah satunya yaitu membagikan aktivitas kampanye secara online melalui akun media sosial tim pemenangan. Demikian sekilas dari pencitraan pasangan calon selama proses kampanye menjelang pilkada dilaksanakan.

Selanjutnya dari pasangan calon nomor urut 2 Lis Darmansyah dan Raja Ariza dengan slogan yang di uung yaitu Tanjungpinang berbenah. Adapun beberapa pengalaman Lis Darmansyah yang digunakan untuk menaikkan citra yaitu Lis Darmansyah pernah menjadi walikota Tanjungpinang pada tahun 2013-2018 dengan wakilnya syahrul. Kemudian selain pengalaman sebagai walikota Lis juga pernah anggota DPRD Provinsi dan Kota dan sangat dikenal sebagai seorang politikus senior. Pada pilkada saat ini Lis Darmansyah menggandeng Raja Ariza

sebagai wakilnya. Di mana pengalaman Raja Ariza yaitu pernah menjadi Pejabat walikota Tanjungpinang periode 2018 (Setdako.Tanjungpinang, 2023). Raja Ariza merupakan birokrat murni yang berpengalaman selama lebih kurang 37 tahun. Dari pengalaman pengalaman pasangan calon Lis-Raja dengan yakin untuk maju pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang Tahun 2024. Selain itu pasangan calon ini juga mendapat dukungan yang begitu besar terutama dari partai pengusung dan koalisi serta beberapa tokoh masyarakat.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pasangan calon Lis-Raja meyakinkan masyarakat dengan ungkapan bahwa Lis-Raja merupakan pasangan yang cocok yang di mana pengalaman kedua yaitu dari kalangan politikus dan birokrat. Setiap kampanye ada perwakilan dari partai pendukung serta tokoh-tokoh yang menyertai kegiatan mereka, yang selalu menegaskan bahwa mereka sangat didukung oleh banyak pihak. Pada kampanye saat ini Lis darmansyah melakukan pendekatan secara religi dengan kegiatan safari subuh dan calon wakil Raja Ariza juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan kultur budaya yang dimiliki. Selain kampanye secara langsung kedua pasangan ini juga aktif membagikan kegiatan yang berkaitan dengan suasana kampanye pada akun media tim pemenangan maupun akun pribadi.

Berdasarkan pengalaman dari masing-masing calon pada penjelasan di atas, dapat dilihat pada Pilkada Kota Tanjungpinang memiliki persaingannya yang ketat di antara kedua pasangan calon. Selain itu masing-masing pasangan calon memiliki dukungan yang terbilang sama-sama besar. Kemudian, proses kedua pasangan calon dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari strategi

mereka saat memperkenalkan diri dan meyakinkan masyarakat dengan tujuan menang pada kontestasi Pilkada.

Selanjutnya, apabila Pilkada merupakan pencalonan maka dengan demikian diperlukannya strategi komunikasi yang terjalin antara kandidat dengan pimpinan partai politik, kemudian jika kampanye pilkada mengenai kemenangan maka perlu merancang komunikasi dengan pimpinan kampanye, relawan, donatur, pendukung serta aktivis, Jika kampanye tersebut tentang organisasi politik maka perlu untuk membangun minat dan tujuan untuk saling percaya dan Jika kampanye pilkada tentang rekrutmen diperlukannya komunikasi untuk memilih kandidat politik yang dapat digunakan sebagai upaya untuk kemenangan Stromback & Kiouis 2014 dalam (Hadrizall & Hamdan M. Salleh, 2022)

Kandidat calon dan partai politik berkepentingan untuk menyusun strategi yang berguna untuk memastikan pemilih agar tidak salah pilih partai ataupun calon lain (Fitriyah, 2012). Hal ini bertujuan untuk memberikan pembeda antar calon satu dengan calon lainnya. Dalam memenangkan pemilu, berbagai macam upaya yang dilakukan dari kandidat untuk dipilih oleh masyarakat. Usaha dalam memenangkan Pilkada sama saja dengan menawarkan barang atau jasa dalam mekanisme pasar kepada masyarakat, produk maupun jasa yang paling banyak digunakan atau dibutuhkan otomatis akan mendominasi pasar (Firmansyah, 2020).

Ada beberapa kasus di luar negeri yang menunjukkan, jika hanya mengandalkan iklan tanpa adanya dukungan dari komponen strategi marketing secara menyeluruh belum tentu bisa membuahkan hasil (Nursal, 2004). Disini, kandidat berupaya untuk mempromosikan dirinya sendiri agar layak dipilih pada

saat pilkada nantinya, yang mana dalam konsep disebut juga dengan pemasaran politik. kemudian (Saputra, 2014a) mengatakan bahwa sebenarnya *marketing* politik bukan konsep dalam menjual partai maupun kandidat, melainkan ini merupakan konsep yang menawarkan bagaimana seorang kandidat maupun partai politik dalam menawarkan program kerja yang berkesinambungan dengan permasalahan yang aktual dilapangan.

Adapun strategi menjadi hal yang sangat krusial dalam setiap proses untuk dapat memenangkan suara pada pemilihan, dengan demikian dapat dikatakan strategi yang baik adalah pola yang tersusun berdasarkan pada rencana-rencana matang dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien (Arif, 2019). Kemudian penggunaan pemasaran politik sebagai sebuah strategi dalam pemenangan pemilu perlu dengan benar dibahas secara detail dan terarah yang meliputi berbagai segmen.

Menurut Firmanzah dalam (Saputra, 2014a) konsep *marketing* di adaptasi dalam dunia politik dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam proses transfer ideologi dan program kerja yang disampaikan dari kandidat kepada masyarakat. Ilmu *marketing* tentu saja menjadi salah satu ilmu yang sangat bagus dan tepat untuk dapat diterapkan dalam proses pemilihan seorang kandidat pada pemilu. Hal ini disampaikan oleh (Al-Barbasyi & Lusi, 2015) bahwa munculnya istilah *marketing* politik adalah fenomena baru dalam dunia politik, di mana ilmu *marketing* tersebut digunakan dalam dunia politik. Pemasaran politik memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk opini publik serta mendorong kesuksesan pada pemilu. Pada akhirnya pemasaran politik yang dilakukan dengan

efektif dapat pula meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih dan menghasilkan hasil kampanye yang sukses.

Ada banyak cakupan kegiatan dalam pemasaran politik yaitu diantaranya penyusunan pesan, pengembangan strategi pada kampanye, serta upaya untuk bisa menjangkau pemilih (Mulyono & Sunyoto, 2024). Dapat dimaknai dengan baik pemasaran politik pada konteks pilkada secara ideal adalah partai politik maupun pasangan calon dapat menyusun berbagai strategi baik itu berupa *product, place, price, dan promotion* dan apapun nantinya secara luas baik itu program kerja yang akan dijalankan apabila pasangan calon tersebut terpilih (Arif, 2019).

Setiap sikap pemilih merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dengan seksama oleh masing-masing kandidat karena hal tersebut bisa berhubungan terhadap strategi *marketing* politik yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon dengan tujuan untuk dapat meraih perolehan suara dari pemilih sebanyak mungkin untuk bisa menang dalam kontekstasi pilkada yang dilaksanakan (Susarno, 2018).

Menurut (Noor, 2023) partai politik dan calon kepala daerah diharuskan untuk melaksanakan kampanye untuk bisa meyakinkan masyarakat sebagai pemilih agar bisa merubah pendapat, sikap, serta keyakinan tentang politik. Hal yang terpenting dalam sebuah strategi kampanye yang dilakukan adalah tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan tujuan. Adanya pemasaran politik ini menurut (Nurhidayat, 2023) dapat membantu organisasi politik seperti para politisi, kandidat untuk mendapatkan dukungan, merubah dukungan untuk mendukung kandidat dengan mempertahankan dukungan yang

dimilikinya , serta reputasi politik yang menjadi cikal bakal dalam menaikkan *branding* kandidat.

Ungkap (Syarbaini et al., 2021) bahwa pemasaran politik ini berguna untuk memaksimalkan kredibilitas, tanggungjawab sosial, membangun citra, adanya keterlibatan masyarakat, menambah serta mempertahankan pemilih. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan studi komparasi atau membandingkan pada strategi *marketing* politik yang digunakan oleh kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang dalam proses membuat produk politik untuk meraih dukungan dari pemilih. Karena strategi *marketing* politik yang digunakan dalam kampanye memiliki peranan penting dalam dalam mendukung kemenangan.

Adapun menang kalahnya pasangan tergantung bagaimana mereka dalam menarik simpatisme masyarakat untuk memilih pasangan calon yang dapat menjalankan tanggungjawab nantinya. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana proses kampanye yang dijalankan dari kaca mata *marketing* politik oleh pasangan calon Lis Darmansyah-Raja Ariza dan Rahma-Rizha Hafiz lalu kemudian membandingkan *marketing* politik di antara keduanya pada pemilihan kepala daerah. Penggunaan *marketing* politik pada proses pembuatan produk politik yang akan dilakukan oleh pasangan calon merupakan keharusan yang dilakukan ditengah-tengah ketatnya persaingan dari dua pasangan calon yang memiliki basis kekuatannya sendiri dalam menarik simpati masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, peneliti ingin melihat bagaimana perbandingan *Marketing* Politik yang digunakan oleh pasangan calon Lis Darmansyah-Raja Ariza dan Rahma-Rizha Hafizd pada pemilihan kepala daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai secara menyeluruh dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait *Marketing* politik yang digunakan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yaitu Lis Darmansyah-Raja Ariza dan Rahma-Rizha Hafiz pada Pilkada Kota Tanjungpinang Tahun 2024 lalu membandingkan antara kedua pasangan calon tersebut. Diharapkan hasilnya berupa pasangan mana yang lebih unggul dalam penggunaan *Marketing* Politik selama kampanye calon berlangsung.

1.4. Manfaat Penelitian.

Dalam sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dapat berguna dan yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan lingkungan sekitarnya. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ada beberapa yang dipaparkan mengenai manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis.

1. Manfaat teortis ialah manfaat yang dapat membantu untuk lebih memahami suatu konsep pada penelitian ini. Manfaat pada hasil penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran terkait startegi *Marketing* politik yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut sehingga bisa dilihat dari strategi yang digunakan bisa membuat kemenangan dari salah satu calon pada kontestasi pilkada Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat menjadi sebuah pengetahuan serta memperluas wawasan ilmiah serta sudut pandang yang baru selama masa perkuliahan terhadap teori-teori yang berlaku dalam mendukung penelitian.
2. Penelitian ini di harapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang bersifat keberlanjutan lalu kemudian diharapkan adanya perbaikan dan penyempurnaan dari pembahasan ini agar kedepannya lebih sempurna lagi. Serta dapat memberikan manfaat terhadap kepada segenap elemen pendidikan dan masyrakat.